

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak terlepas dari peran lembaga keuangan yang mempunyai peranan sangat penting dalam memajukan perekonomian yang berada di suatu daerah. Salah satu lembaga keuangan yang diterapkan di Indonesia khususnya yang terdapat di Bali adalah lembaga perkreditan desa (LPD). Melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007, Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman. LPD merupakan salah satu potensi yang dimiliki Bali yang belum dimiliki daerah lain di Indonesia. Menyatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu unsur kelembagaan keuangan desa pakraman yang berfungsi untuk mengelola potensi keuangan desa pekraman tersebut. Landasan oprasional LPD adalah peraturan (awig-awig) desa yang mengedepankan sebuah ikatan kekeluargaan dan semangat gotong royong antar warga desa.

Kota Denpasar merupakan salah satu kota yang terletak di provinsi Bali, dan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Bali, Wilayah Kota Denpasar dibagi menjadi 4 kecamatan yaitu, Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Denpasar Selatan merupakan salah satu bagian wilayah dari kota Denpasar. Denpasar Selatan merupakan salah satu bagian wilayah dari kota Denpasar dimana juga terdapat Lembaga Perkreditan Desa didalamnya. Jumlah LPD

yang terdapat di Kecamatan Denpasar Selatan hingga tahun 2021 yaitu sebanyak 11 LPD. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah.

LPD tercipta sebagai bentuk kepedulian lembaga keuangan dalam mewujudkan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang mandiri serta membantu pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam wilayah desa. Kegiatan LPD itu sendiri adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat desa. Setiap LPD mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang di dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Untuk mencapai keuntungan yang maksimal LPD harus menjalankan usahanya secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan tetap menjaga tingkat kesehatan LPD.

Tabel 1.1
Laba/Rugi LPD Kota Denpasar Selatan

NO.	Nama LPD	2017	2018	2019	2020
1	Intaran	1.932.213	260.474	464.002	-7.369.684
2	Kepaon	4.553.710	3.878.881	4.851.655	2.592.058
3	Panjer	6.554.511	6.729.709	6.888.029	4.769.555
4	Pedungan	6.232.914	6.588.045	7.051.335	4.522.477
5	Pemogan	4.674.488	4.709.919	4.218.486	2.202.545
6	Penyaringan	565.791	603.561	689.674	408.536
7	Renon	878.993	796.433	641.646	92.259
8	Sanur	1.568.483	1.716.386	2.122.100	708.791
9	Serangan	103.622	132.336	71.382	0
10	Sesetan	2.431.153	2.462.925	2.586.771	1.821.152
11	Sidakarya	1.809.628	2.059.872	2.325.911	1.584.617
TOTAL		31.305.506	29.938.541	31.910.991	11.305.306

Sumber : Data LPLPD Kota Denpasar (2021)

Tabel 1.1 menyatakan fenomena yang terjadi terhadap profitabilitas empat tahun terakhir di LPD Kota Denpasar Selatan yaitu 11 LPD yang berada di Denpasar Selatan mengalami peningkatan laba dan penurunan laba yang tidak signifikan setiap tahunnya. Tahun 2018 LPD Denpasar Selatan

mengalami penurunan sebesar 1.366.965 dari tahun sebelumnya, pada tahun 2019 dapat menaikkan labanya kembali sebesar 1.972.450 dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 20.605.685. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa laba yang dihasilkan Lembaga Perkreditan Desa di Denpasar Selatan tahun 2017-2020 mengalami peningkatan dan penurunan yang sangat berfluktuasi dan stagnan.

Kesehatan LPD sangatlah penting bagi semua pihak seperti pemilik, pengelola dan pengguna jasa. Kesehatan LPD dapat dilihat dari profitabilitasnya. Profitabilitas merupakan kemampuan LPD untuk mencari dan menghasilkan laba secara efektif dan efisien dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan (Kasmir, 2015:114). Hal ini ditunjukkan dengan diperolehnya laba yang berasal dari penjualan maupun pendapatan (kasmir, 2015:114). Perlu dilakukan analisis profitabilitas LPD untuk melihat sejauh mana LPD sudah mampu mengelola keuangan.

Menurut Rivai, ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen lembaga keuangan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total asset LPD, rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi, semakin besar ROA suatu lembaga perkreditan desa maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh Lembaga Perkreditan Desa tersebut.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan LPD diperlukan sistem pengendalian intern sebagai upaya mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme didalam perusahaan. Menurut Mulyadi (2020), sistem pengendalian intern yaitu meliputi struktur organisasi dan seluruh cara-cara serta alat-alat yang di koordinasikan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta (asset) milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mengoptimalkan efisiensi didalam operasi dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan Menurut AICPA (2020), Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut: efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku. Sistem pengendalian intern adalah suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan.

Adapun tujuan perusahaan membuat sistem pengendalian intern adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, keakuratan laporan keuangan perusahaan, kelancaran oprasional ke perusahaan, kedisiplinan dipatuhinya kebijakan manajemen, agar semua lapisan yang ada diperusahaan tunduk pada hukum dan aturan yang sudah ditetapkan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Trisnadewi (2018), Janawati dan Badera (2018) menunjukkan bahwa pengendalian intern kredit berpengaruh positif terhadap kemampulabaan . Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Wilatini (2019) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Semakin meningkatnya kredit yang diberikan maka akan menimbulkan permasalahan yang sering dihadapi LPD. Dalam pemberian kredit dapat terjadi suatu kredit bermasalah atau kredit macet, kredit yang bermasalah dapat mempengaruhi laba atau keuntungan yang diperoleh sehingga LPD perlu mencari solusi disaat terjadi masalah dalam pemberian kredit. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit adalah *Non Performing Loan (NPL)*, Rasio ini mengukur kemampuan lembaga keuangan dalam meminimalkan kredit bermasalah yang dihadapi.

Perputaran piutang yang terjadi dapat menunjukkan berapa kali piutang timbul sampai piutang tersebut dapat tertagih dan dapat dikembalikan ke kas perusahaan tersebut. Semakin meningkat tingkat perputaran kredit maka keuntungan atau profitabilitas akan meningkat pula, dengan asumsi total penjualan kredit adalah tetap dan begitu pula sebaliknya. Hasil penelitian Sundari (2019) menunjukkan hasil bahwa tingkat perputaran kredit berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian Yani (2018) menunjukan bahwa tingkat perputaran kredit berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi profitabilitas adalah jumlah nasabah. Nasabah adalah sumber pendapatan Bank, dimana keuntungan utama bank dari transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya. Nasabah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau

rendahnya profitabilitas yang diperoleh oleh suatu lembaga keuangan. Meningkatnya jumlah kebutuhan nasabah penyimpan maupun peminjam berpengaruh terhadap lembaga keuangan dalam menghasilkan sebuah laba, maka kesempatan lembaga keuangan tersebut untuk memperoleh profitabilitas semakin tinggi. Hasil penelitian Suputri (2021) menunjukkan hasil bahwa jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Ariastini, Cipta, & Yulianthini (2017) dan Dewi (2018) menunjukkan bahwa jumlah nasabah kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Ni Putu Ayu Widari, I Ketut Sunarwijaya, I Kadek Apriada (2021) menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah nasabah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hal ini berarti bahwa apabila pertumbuhan jumlah nasabah meningkat, maka tingkat profitabilitas juga akan meningkat. Sebaliknya, apabila pertumbuhan jumlah nasabah menurun, maka tingkat profitabilitas juga akan menurun. Namun demikian, hasil penelitian yang dilakukan Swastini (2016) menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan pertumbuhan jumlah nasabah kredit dibarengi dengan semakin banyaknya kredit macet yang diperoleh oleh LPD tersebut sehingga beban kerugian yang ditanggung karena adanya kredit macet mengurangi profitabilitas LPD.

Penelitian mengenai LPD ini dilakukan, karena LPD mempunyai keunikan tersendiri yaitu hanya terdapat di Bali serta mempunyai peran penting dalam masalah keuangan bagi masyarakat desa di Bali yang disebut

dengan desa pakraman. Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar Selatan karena Kota Denpasar merupakan ibukota Provinsi Bali dan LPD di Kota Denpasar Selatan tetap bertahan ketika banyak LPD di Kabupaten lainnya mengalami kebangkrutan. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya juga menjadi suatu kesenjangan (*research gaps*). Laba menjadi faktor utama karena sebagai dominasi utama kelangsungan hidup perusahaan selanjutnya . Oleh karena itu penelitian lanjutan ini dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laba atau profitabilitas. Sesuai latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengendalian Intern, Perputaran Kredit dan Pertumbuhan Jumlah Nasabah Terhadap Profitabilitas LPD di Denpasar Selatan Tahun 2017-2020.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017-2020 ?
- 2) Apakah perputaran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017-2020?
- 3) Apakah pertumbuhan jumlah nasabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada LPD di kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap profitabilitas LPD di Denpasar Selatan Tahun 2017-2020.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh perputaran kredit terhadap profitabilitas LPD di Denpasar Selatan Tahun 2017-2020.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan jumlah nasabah terhadap profitabilitas LPD di Denpasar Selatan Tahun 2017-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) **Manfaat Teoritis**

Bagi Mahasiswa hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengaplikasikan teori dan praktek yang telah didapat pada bangku perkuliahan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu hasil studi empiris untuk memberikan pemahaman, gambaran dan wawasan mengenai pengaruh pengendalian intern, perputaran kredit dan pertumbuhan jumlah nasabah terhadap profitabilitas.

Bagi Univeristas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu akuntansi dan manajemen sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan meneliti lebih lanjut terhadap masalah yang terkait.

- 2) **Manfaat Praktis**

Bagi Perusahaan (LPD di Kecamatan Denpasar Selatan) hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan agar mampu meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan informasi bagi Lembaga Perkreditan Desa dalam memecahkan masalah yang ada di lapangan guna meningkatkan profitabilitas Lembaga Perkreditan Desa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi bagi manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dan perubahan positif pada lembaga perkreditan desa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*agency theory*) menurut R.A Supriyono (2018:63) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Masalah keagenan dapat terjadi jika adanya ketidaksamaan tujuan antara pihak *agent* (manajemen perusahaan) dan pihak *principal* (pemegang saham). Manajer cenderung ingin menggunakan laba yang dihasilkan perusahaan dengan porsi yang lebih besar sebagai saldo laba yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pembayaran hutang kepada kreditor maupun untuk melakukan ekspansi perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham atau investor lebih cenderung ingin menggunakan laba yang dihasilkan perusahaan dengan porsi yang lebih besar untuk digunakan sebagai pembayaran dividen. Tujuan pada utama dari teori keagenan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai

dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidak pastian. Teori ini juga menekankan eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang melengkapi kontraktual. Principal harus mengendalikan konflik keagenan untuk mencegah timbulnya masalah yang menghambat kemajuan perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penghimpunan dana pihak ketiga serta penyaluran kredit oleh pihak manajemen LPD perlu diawasi agar profitabilitas dari LPD tersebut dapat meningkat. Pengawasan disini dilakukan oleh badan pengawasan serta masyarakat desa pakraman, yang dimana desa pakraman juga ikut serta dalam mengawasi dan menilai bagaimana kepala LPD menggunakan dana milik masyarakat desa seperti halnya dalam penyaluran kredit. Disamping itu Kepala LPD berperan aktif dalam mencegah terjadinya masalah-masalah dan kecurangan yang mungkin akan terjadi seperti halnya kredit macet dan penyelewengan aset.

2.1.2 Pengendalian Intern

Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2016:129) pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang digabungkan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Selain itu, Hery (2019:132) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Hery (2019:134) menjelaskan bahwa komponen pengendalian internal yang dikeluarkan oleh Committee of Sponsoring Organizations atau disingkat COSO (2013) yaitu sebagai berikut:

1) Lingkungan pengendalian

Merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik perusahaan secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti pentingnya bagi perusahaan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam lingkungan pengendalian yaitu: integritas dan nilai etik, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, gaya manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi, dan kebijakan perihal sumber daya manusia.

2) Penilaian risiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

3) Informasi dan Komunikasi

Merupakan pengidentifikasian. Penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan.

4) Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko telah diambil guna mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan dan prosedur tersebut adalah pemisahan tugas, otorisasi yang tepat atas transaksi. dokumen dan

catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aset dan catatan, serta pemeriksaan independen atau verifikasi internal.

5) Pemantauan

Merupakan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan.

Tujuan dilaksanakannya pengendalian internal menurut Mulyadi (2016:129) yaitu:

- 1) Melindungi aset organisasi
- 2) Memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi
- 3) Mendorong efisiensi usaha
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.1.2.1 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. “Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah :

- 1) Menjaga kekayaan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan

perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

2) Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

3) Mendorong efisiensi.

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Untuk mencapai kegunaan dan tujuan pengendalian internal diatas maka diperlukan adanya sistem informasi akuntansi yang benar hal ini dapat memberikan bantuan yang utama terhadap kekayaan perusahaan dengan cara penyelenggaraan pencatatan aktiva yang baik. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka

akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan

2.1.2.2 Unsur Pengendalian Internal

Unsur-unsur Pengendalian Internal Kas adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Diantara ke empat unsur pengendalian tersebut, unsur mutu karyawan yang sesuai dengan tanggung jawabnya merupakan unsur pengendalian yang paling penting. Karena apabila karyawan yang ditempatkan tidak sesuai dengan kemampuannya maka seluruh aktivitas tidak akan berjalan lancar dan apa yang telah dilakukan tidak akan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, unsur manusia atau karyawan harus benar-benar ditempatkan sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta memiliki tugas yang telah ditetapkan agar apa yang menjadi tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik.

2.1.2.3 Keterbatasan Pengendalian Internal

Tidak ada suatu sistem pun yang dapat mencegah secara sempurna semua pemborosan dan penyelewengan yang terjadi pada suatu perusahaan, karena pengendalian internal setiap perusahaan memiliki keterbatasan bawaan, keterbatasan-keterbatasan suatu pengendalian internal tersebut, keterbatasan bawaan yang melekat pada setiap pengendalian internal adalah:

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan
- 2) Gangguan
- 3) Kolusi
- 4) Pengabaian oleh manajemen
- 5) Biaya lawan manfaat

Menurut kutipan diatas dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

- 1) Kesalahan dalam pertimbangan seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil
- 2) Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian
- 3) Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) di tempat mereka bekerja.
- 4) Pengabaian oleh manajemen muncul karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, sehingga proses pengendalian cenderung lebih efektif pada manajemen tingkat bawah dibandingkan pada manajemen tingkat atas.

- 5) Biaya lawan manfaat, konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mempunyai arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkan.

2.1.3 Kredit

1) Pengertian Kredit

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Menurut Stefan (2004), pertumbuhan kredit menggambarkan tingkat volume kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga yang mampu memberikan peningkatan profitabilitas suatu lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, penyaluran kredit merupakan kegiatan utama. Kasmir (2016:97) mendefinisikan kredit menurut asal mulanya yaitu berasal dari kata *credere* yaitu berarti kepercayaan, maksudnya apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan. Bagi pemberi kredit artinya member kepercayaan kepada seorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali (Marliana dan Syahelmi, 2009:3). Menurut Siamat (2005:3), kredit merupakan pinjaman disertai janji untuk membayar kembali dimasa yang akan datang, sementara menurut Mahrmasari (2006:19), kredit adalah pemberian prestasi oleh satu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontraprestasi berupa pendapatan bunga.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kesempatan atau perjanjian pinjam-meminjam antara pihak satu dengan pihak lain, dimana dapat jangka waktu pengembalian kredit yang

harus ditepati serta pihak peminjam wajib melunasi kewajibannya disertai dengan pemberian bunga kepada pihak yang memberikan pinjaman.

2) Tujuan dan Fungsi Kredit

Suatu fasilitas kredit diberikan dengan memiliki tujuan tertentu. Tujuan pemberi kredit tersebut tidak lepas dari misi bank terikat. Adapun beberapa tujuan utama pemberian suatu kredit (Kasmir,2016:100) antara lain :

a) Mencari keuntungan

Untuk memperoleh keuntungan hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak bank sebagai balasan jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini untuk menjamin kelangsungan hidup bank.

b) Membantu Usaha Nasabah

Untuk membantu usaha nasabah pihak bank yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut maka pihak peminjaman akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c) Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka akan semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Terkait dengan tujuan kredit, terdapat pula fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan (Sarwedi, 2005:35) yaitu :

- (1) Meningkatkan daya guna (*utility*) uang dan barang
- (2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- (3) Salah satu stabilitas ekonomi

(4) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat

(5) Kredit tanpa menciptakan alat pembayaran baru.

Menurut Dodik dan Tri (2018:18) pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tujuan kredit yang diberikan suatu LPD mempunyai tugas, yaitu :

- a) Turut menyukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan
 - b) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan perusahaan agar dapat menjalankan fungsi guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
 - c) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup lembaga keuangan terjamin dan dapat memperluas usahanya.
- 3) Macam-macam Kredit

Menurut Sudiman (2000:50) LPD menggolongkan kredit berdasarkan kolektibilitasnya menjadi 4 (empat) golongan sebagai berikut :

a) Kredit Lancar

Suatu kredit golongan lancar apabila tidak ada tunggakan pokok atau bunga atau pembayaran pokok dengan bunga maksimal 3(tiga) kali berturut-turut.

b) Kredit Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila menunggak pembayaran pokok atau bunga maksimal 6 (enam) kali berturut-turut.

c) Kredit Diragukan

Suatu kredit digolongkan apabila menunggak pembayaran pokok atau bunga maksimal 9 (Sembilan) berturut-turut.

d) Kredit Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila penunggakan pembayaran pokok atau bunga dari 9 (Sembilan) kali berturut-turut.

Kredit bermasalah akan berdampak negatif baik bagi kelangsungan hidup lembaga keuangan itu sendiri maupun bagi perekonomian Negara (Meliyanti, 2005:4). Baik dari segi profitabilitas sendiri dari kredit bermasalah akan berdampak pada penurunan profitabilitas.

4) Jenis- jenis Kredit

Menurut Kasmir (2016:103) kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat dapat diatur dari berbagai segi, antara lain:

a) Dilihat dari segi kegunaanya

(1) Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

(2) Kredit Modal Kerja

Biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b) Dilihat dari segi tujuan kredit

(1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

(2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.

(3) Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli dalam jumlah besar.

c) Dilihat dari segi jangka waktunya.

(1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang dimiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

(2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit berkisar satu tahun sampai dengan tiga tahun, biasanya untuk investasi.

(3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang mana pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun.

d) Dilihat dari segi jaminan

(1) Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Intinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

(2) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.

e) Dilihat dari sektor usaha

(1) Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

(2) Kredit Perternakan

Dalam hal ini untuk jangka waktu pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

(3) Kredit Industri

Yaitu kredit yang membiayai industri kredit, menengah atau besar.

(4) Kredit Pertambangan

Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah

(5) Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

(6) Kredit Profesi

Diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

(7) Kredit Perusahaan

Yaitu untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

5) Tingkat perputaran kredit

Perputaran kredit merupakan perputaran piutang dalam periode tertentu. Tingkat perputaran piutang suatu perusahaan yang tertanam dalam piutang, makin tinggi tingkat perputaran piutang, menunjukkan modal kerja yang tertanam dalam piutang rendah, sebaliknya kalau tingkat perputarannya rendah berarti ada kelebihan investasi dalam piutang sehingga semakin besar dana yang harus diinvestasikan dalam piutang untuk mempertahankan suatu tingkat penjelasan kredit tertentu (Matrisyati, 2012)

Menurut Husnan dan Enny (2006:75) rasio tingkat perputaran piutang (*receivable turnover*) dapat dihitung dengan membagi total penjualan kredit selama periode tertentu yang berasal dari operasi dengan jumlah rata-rata piutang (*average receivable*). Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang

dilunasi dalam satu tahun. Semakin besar maka akan semakin baik karena penagihan piutang dilakukan secara cepat.

2.1.4 Jumlah Nasabah

Nasabah merupakan masyarakat yang mempunyai kepentingan langsung dengan bank (Kasmir, 2009:208). Mereka pada umumnya para penyimpan uang dengan baik dalam bentuk giro, deposit atau tabungan, para penerima kredit, penerima transfer uang, para penerima pedagang pasar modal, sedangkan pengertian nasabah menurut Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bab I Pasal I adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank (ayat 16)
- 2) Nasabah penyimpanan adalah nasabah yang menempatkan dananya di lembaga keuangan dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan (ayat 17)
- 3) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan (ayat 18).

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah orang yang menjadi pelanggan bank yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman. Sesuai dengan pasal 7 Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 maka yang menjadi nasabah LPD adalah Krama desa setempat.

2.1.5 Profitabilitas

Menurut Sofyan (2015:304) menyatakan bahwa “Profitabilitas adalah kemampuan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dll.” Sedangkan Munawir menyatakan bahwa “Rentabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu atau modal perusahaan dapat diketahui dengan jumlah aktiva atau modal perusahaan tersebut.” Kemudian Simongkir menyatakan bahwa “Profitabilitas atau Rentabilitas adalah kemampuan dalam memperoleh laba.”

Jadi berdasarkan pengertian tersebut menyatakan bahwa profitabilitas kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan selama periode tertentu dengan modal yang digunakan, biasanya profitabilitas suatu perusahaan dilihat dari laporannya.

2.1.5.1 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Adapun Tujuan dan Profitabilitas menurut Kasmir adalah :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan dalam tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- 4) Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- 5) Untuk mengukur produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

Adapun manfaat profitabilitas menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

- a) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b) Mengetahui laba dari waktu ke waktu
- c) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak modal sendiri..
- d) Mengetahui produktifitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman.

2.1.6 Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

LPD merupakan salah satu unsur kelembagaan desa pekraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pekraman untuk mengelola potensi keuangan desa pekraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi kepentingan desa itu sendiri (Susanti,2014)

LPD di Bali mulai berkembang sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1084 tertanggal 1 November 1984, yang lebih lanjut dilakukan kembali dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 12 September 2002 tentang LPD, bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan desa pekraman dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat keuangan desa sebagai sarana penunjang melalui pendirian suatu badan milik desa berupa LPD yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.

LPD adalah suatu sarana bagi usaha simpanan pinjaman milik masyarakat desa pekraman yang berada di provinsi Bali dan merupakan

sarana perekonomian rakyat pedesaan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No 8 Tahun 2002. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa yang telah berkembang, memberikan manfaat social, ekonomi, dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina dan ditingkatkan kinerjanya dan dilestarikan (Susanti, 2014).

2.1.6.1 Fungsi dan Tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

1) Fungsi dan tujuan LPD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- a) Mendorong perkembangan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta menyalurkan modal yang efektif.
- b) Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan.
- c) Meningkatkan daya beli dan kelancaran lalu lintas pembayaran dan peredaran di desa.

2) Kedudukan Desa Adat dalam Perkembangan LPD

Menurut Dewi dan Suartana (2009:189) desa adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional. Desa adat memiliki beberapa hak otonomi, salah satu diantaranya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antara kelompok masyarakat serta pengelolaan kekayaan desa adat. Kedudukan desa adat di dalam perkembangan dan keberadaan LPD sangat strategis dalam pertimbangan sebagai berikut :

- a) Desa adat merupakan lembaga tradisional yang telah mengakar dan dihormati oleh masyarakat pedesaan terutama adatnya.

- b) Desa adat memiliki peraturan-peraturan yang telah disepakati dan dipatuhi, baik secara tertulis maupun lisan.
- c) Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang bersifat kelompok yang didasarkan pada geografis adat yang sudah tentu interaksi sosial yang terjadi sehari-hari menyebabkan bertambahnya rasa kesatuan dan kerjasama alamiah sebagai terwujudnya gotong-royong yang berjalan erat.

3) Pengelolaan dan Kegiatan Usaha LPD

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurusan, dimana pengurus bertanggung jawab kepada karna desa, dan di dalam melaksanakan dan mengelola LPD, pengurus dapat mengangkat karyawan dalam bentuk kegiatan operasional lembaga. Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali nomor Tahun 2002 yang saat ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh LPD adalah sebagai berikut :

- a) Menerima atau menghimpun dana karna desa dalam bentuk tabungan dan deposito.
- b) Memberikan pinjaman hanya kepada krama desa untuk kegiatankegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri, atau kerajinan kecil, perdagangan, dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu.

- c) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimal sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau bantuan dana.
- d) Menyimpan kelebihan Likuiditasnya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

LPD dilarang menanamkan modal pada perusahaan atau usaha milik anggota masyarakat atau milik perseorangan atau perusahaan berbadan hukum dimanapun (pasal 7 ayat 2). Larangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan usaha LPD yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil masyarakat desa. Ketentuan ini juga didasarkan pada pertimbangan penghindaran resiko ikut menanggung kerugian apabila perusahaan tempat menanam modal mengalami kerugian atau masalah lain yang dapat merugikan LPD. LPD hanya menanamkan modalnya kepada usaha milik desa. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan lembaga keuangan dalam penghimpunan dana pihak ketiga, diantaranya yaitu :

- (1) Kepercayaan masyarakat
- (2) Pendapatan masyarakat
- (3) Pelayanan lembaga keuangan
- (4) Ekspektasi tingkat bunga

Dapat dikatakan bahwa LPD bertujuan untuk mendorong pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di pedesaan serta membrantas segala macam gadai gelap sehingga dapat melancarkan lalu lintas pembayaran.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Penelitian Ni Wayan Jessy Janawati, I Dewa Nyoman Badera (2018)

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu menguraikan tentang Pengaruh Pengendalian Intern Kredit, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan dan satu variabel dependen yaitu Kemampulabaan LPD di Kota Denpasar. Penelitian ini dilakukan di sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern kredit, likuiditas, dan ukuran perusahaan pada kemampulabaan LPD di Kota Denpasar. Sampel penelitian diperoleh sebanyak 35 dengan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan adalah linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh pada kemampulabaan LPD di Kota Denpasar. (2) Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa pengendalian intern kredit dan likuiditas berpengaruh positif terhadap kemampulabaan, namun variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kemampulabaan.

2) Penelitian Anak Agung Putu Diah Sundari, Luh Komang Merawati Daniel Raditya Tandio (2019)

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu menguraikan tentang Pengaruh Perputaran Kas, Pertumbuhan Kredit, Perputaran Kredit, Kecukupan Modal, dan BOPO dan satu variabel dependen yaitu Profitabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat perputaran kas, tingkat pertumbuhan kredit, tingkat

perputaran kredit, tingkat kecukupan modal, dan BOPO terhadap profitabilitas Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Kota Denpasar periode 2017 - 2019. Populasi penelitian ini adalah Penelitian berjumlah 35 LPD yang terdaftar di LPLPD wilayah Kota Denpasar tahun 2017 - 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah 34 LPD dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel tingkat perputaran kas dan tingkat pertumbuhan kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (2) variabel tingkat perputaran kredit dan tingkat kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. (3) variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas LPD di Kota Denpasar periode 2017-2019. Sebaliknya penelitian Yani (2018) menunjukkan bahwa tingkat perputaran kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

3) Penelitian Ni Made Nita Sari Suputri, Ni Luh Gde Novitasari, Ni Luh Putu Sandrya Dewi (2021)

Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Tingkat Perputaran Kredit, Biaya Oprasional Pendapatan Oprasional, Tingkat Kecukupan Modal, dan Jumlah Nasabah dan satu variabel dependen yaitu Profitabilitas. Penelitian ini dilakukan di sebuah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar. Suatu LPD dikatakan dapat dilihat dari kemampuan LPD tersebut dalam memperoleh keuntungan. Untuk mendapatkan

profitabilitas, LPD harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh pengaruh tingkat perputaran, tingkat perputaran kredit, biaya operasional pendapatan operasional (BOPO), tingkat kecukupan modal dan jumlah nasabah terhadap profitabilitas LPD di Kota Denpasar periode 2017-2019. Penelitian ini dilakukan di LPLPD Kota Denpasar yang terdiri dari 35 LPD yang dijadikan sampel dan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel tingkat perputaran kredit dan tingkat kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas. (2) Variabel operasional pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas LPD. (3) Sedangkan variabel tingkat perputaran kas dan jumlah nasabah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas LPD. Sebaliknya Hasil penelitian yang dilakukan Yuni, dkk (2017) menyatakan bahwa jumlah nasabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini mengambil dari variabel diatas salah satunya yaitu Pengendalian Intern, Perputaran Kredit, Pertumbuhan Jumlah Nasabah dan Profitabilitas. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 11 LPD terdapat di Denpasar Selatan yang sudah terdaftar di LPLPD di LPD se-Kota Denpasar. Untuk pengambilan sampel di LPD Denpasar Selatan